

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan pengukuran rasio PAD/TPD, rasio BHPBP/TPD dan rasio SB/TPD pada tingkat desentralisasi fiskal, maka data yang sudah dilakukan perhitungan rasio tersebut dan Hasil Uji Sampel Berpasangan (Paired T Test) terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Dapat dilihat dari sebelum penerapan kebijakan desentralisasi fiskal secara berurutan dari rasio PAD/TPD, rasio BHPBP/TPD dan rasio SB/TPD adalah 27,21%, 4,91% dan 67,78%. Sedangkan dapat dilihat dari sesudah penerapan kebijakan desentralisasi secara berurutan dari rasio PAD/TPD, rasio BHPBP/TPD dan rasio SB/TPD adalah 46,35%, 14,56% dan 38,50%.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase PAD terhadap TPD, dari persentase BHPBP terhadap TPD dan dari persentase SB

terhadap TPD pada masa sesudah desentralisasi fiskal, tingkat desentralisasinya menguat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sesudah otonomi daerah, pemerintah daerah sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat. Hanya saja persentase SB terhadap TPD mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi persentase yang lainnya.

## 2. Tingkat Kemandirian Pembiayaan

Berdasarkan pengukuran rasio PAD/TKD, rasio PAD/KR dan rasio PAD+BHPBP/TKD pada tingkat kemandirian pembiayaan, maka data yang sudah dilakukan perhitungan rasio tersebut dan Hasil Uji Sampel Berpasangan (Paired T Test) terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Dapat dilihat dari sebelum penerapan kebijakan desentralisasi fiskal secara berurutan dari rasio PAD/TKD, PAD/KR dan PAD+BHPBP/TKD adalah 26,64%, 47,96% dan 31,49%.

Sedangkan dapat dilihat dari sesudah penerapan kebijakan desentralisasi secara berurutan dari rasio PAD/TKD, PAD/KR dan PAD+BHPBP/TKD adalah 51,19%, 89,32% dan 67,71%.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian pembiayaan yang dilihat dari persentase PAD terhadap TKD, dari persentase PAD terhadap KR dan dari persentase PAD ditambah BHPBP terhadap TKD pada masa sesudah desentralisasi fiskal semakin tinggi rasionya sehingga mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan Provinsi semakin rendah.

### 3. Kinerja Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan pengukuran rasio TSA/TBD dan rasio TPL/TBD pada tingkat kinerja efisiensi penggunaan anggaran, maka data yang sudah dilakukan perhitungan rasio tersebut dan Hasil Uji Sampel Berpasangan (Paired T Test) terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Dapat dilihat dari sebelum penerapan kebijakan desentralisasi fiskal secara berurutan dari rasio TSA/TBD dan TPL/TBD adalah 0,99% dan 1124,87%. Sedangkan dapat dilihat dari sesudah penerapan kebijakan desentralisasi secara berurutan dari rasio TSA/TBD dan TPL/TBD adalah 4,86% dan 4,27%.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja efisiensi anggaran yang dilihat dari persentase TSA terhadap TBD mengalami peningkatan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tetapi pada persentase TPL terhadap TBD mengalami penurunan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur input yang digunakan berbeda dengan output yang dihasilkan sesudah desentralisasi fiskal.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat desentralisasi fiskal pada pengukuran rasio PAD/TPD, rasio BHPBP/TPD dan rasio SB/TPD, maka perlu diupayakan untuk

meningkatkan penerimaan daerah yang lebih diprioritaskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pemerintah memiliki kinerja yang baik kedepannya dan dapat dipertahankan.

2. Berdasarkan tingkat kemandirian pembiayaan pada pengukuran rasio PAD/TKD, rasio PAD/KR dan rasio PAD+BHPBP/TKD, maka pemerintah dapat menggali potensi daerahnya lebih baik lagi dari sumber-sumber penerimaan dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) dan diharapkan persentase rasio kemandiriannya semakin tinggi untuk ke depannya agar tingkat ketergantungannya tidak semakin meningkat.
3. Berdasarkan tingkat kinerja efisiensi penggunaan anggaran pada pengukuran rasio TSA/TBD dan rasio TPL/TBD, ketergantungan terlihat rendah sehingga kinerjanya semakin membaik dan perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan kemampuan perencanaannya dan pengawasannya terhadap anggaran keuangan daerah sehingga kebocoran dapat dikurangi.